

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Hubungan Internasional merupakan suatu studi hubungan yang berkaitan dengan interaksi antar negara dengan negara lainnya, termasuk aktivitas dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional dapat berupa subjek teoritis, subjek praktis maupun subjek kebijakan yang pendekatannya dapat bersifat empiris atau normatif atau bahkan keduanya. (Jackson & Sorensen, 2013).

Sedangkan menurut Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan mendefinisikan Disiplin Hubungan Internasional (HI) adalah studi akademis yang sangat luas dengan melibatkan persoalan yang mencakup berbagai sub-bidang seperti kenegaraan diplomatik dan luar negeri seperti analisis kebijakan, politik komparatif, sosiologi sejarah, internasional ekonomi politik, sejarah internasional, studi strategis dan militer, etika dan teori politik internasional. Dalam bukunya yang berjudul *International Relations: The Key Concepts* (2002), Martin Griffiths juga membahas mengenai hubungan internasional yang melahirkan globalisasi sebagai sesuatu yang membawa perubahan dan transformasi terhadap struktur budaya, politik dan ekonomi yang menjadi pemicu tumbuhnya pemahaman bahwa ruang gerak kemanusiaan tidak bisa dibatasi secara efektif dengan wilayah dan garis-garis geografi. (Griffiths & O'Callaghan, 2002)

Kajian hubungan Internasional memperdalam bahasan mengenai isu-isu global yang melibatkan negara-negara dalam sistem internasional termasuk melibatkan peran negara, organisasi internasional, pemerintah dan non pemerintah seperti NGO dan LSM, juga perusahaan multinasional. HI mencakup aspek luas yang mempengaruhi tatanan masyarakat internasional dan kehidupan sosial antar manusia yang melintasi batas – batas negara. Seiring perkembangan zaman, Hubungan Internasional juga diwarnai oleh munculnya permasalahan-permasalahan baru yang berkaitan dengan isu – isu global kontemporer.

Berbicara mengenai isu kontemporer dalam dinamika Hubungan Internasional, hadirnya globalisasi turut menjadi faktor penting dalam mengubah

suatu tatanan sistem masyarakat global. Gerakan-gerakan sosial dan kemajuan teknologi yang berkembang semakin cepat, tentunya menjadi acuan bagi masyarakat di beberapa negara kawasan Timur Tengah yang ingin menciptakan perubahan politik ke arah pro-demokratisasi.

Berawal dari suatu fenomena dengan istilah *Arab Spring* yang dimulai pada tahun 2010 sampai dengan pertengahan 2011, kondisi ini merupakan suatu awal mula desakan demokrasi yang di organisir oleh aktivis muda terhadap pemerintahan di negara Arab Saudi dan Timur Tengah. yang mulai melakukan transisi dari negara yang bersifat monarki menjadi negara yang demokratis.

Arab Spring bermula sejak adanya perlawanan di Tunisia oleh para demonstran yang turun sebagai bentuk perlawanan rakyat untuk menumbangkan rezim Ben ali, karena kinerja buruknya yang dinilai tidak dapat mengendalikan laju ekonomi domestik, tingginya korupsi dan bertambahnya angka pengangguran di Tunisia. Tidak kondusifnya keadaan di dalam negara yang disebabkan oleh kericuhan rakyat membuat Ben Ali melarikan diri ke Jeddah, Arab Saudi. Hal ini menjadi tanda berakhirnya rezim Ben Ali. Oposisi rakyat pun mulai menggerakkan transisi perubahan di Tunisia.

Gerakan serupa juga dihadapi oleh negara Timur Tengah lainnya, yakni Mesir yang berganti kepemimpinan dari Husni Mubarak beralih kepada pihak militer di tahun 2012 akibat tuntutan mundur dari rakyat atas ketidak becusan pemimpin dalam mengatasi pengangguran, korupsi dan kesenjangan antar rakyat miskin dan kaya.

Hancurnya rezim Ben Ali dan Husni Mubarak di tangan rakyat, memercikan semangat revolusi negara-negara di sekitar Timur Tengah, yakni Yaman, Bahrain, Libya, Aljazair, Yordania, dan Suriah. Fenomena *Arab Spring* ini merupakan langkah baru yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pemberontakan rakyat dan gerakan massa untuk menurunkan pemerintahan rezim yang otoriter merupakan proses dari transisi demokratisasi yang selama ini dinantikan oleh rakyat.

Kebangkitan negara Arab Saudi ini memunculkan beberapa isu baru yang menjadi perdebatan terutama pada aspek *social culture*, karena ada beberapa hal dari konsep demokrasi yang dinilai bertolak belakang dengan ideologi negara

yang cenderung masih konservatif. Meskipun begitu, seiring dengan waktu nilai-nilai demokrasi mulai di junjung tinggi oleh negara di Timur Tengah, terutama Arab Saudi. (Mardhatillah, Darmawan, Sufa, & Ndadari, 2014)

Hal menarik yang menjadi sorotan atas bangkitnya demokrasi di Timur Tengah, salah satunya adalah mengenai isu perempuan di negara tersebut. Dimana masih sangat kentalnya budaya patriarki yang tidak terlepas dari ideologi konservatif membuat terciptanya segregasi antara perempuan dan pria sehingga menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesetaraan gender di negara Timur Tengah terutama Arab Saudi.

Penulis berpendapat bahwa perempuan yang mengalami ketidak-setaraan gender di Arab Saudi merasakan dominasi pria di segala aspek, baik dari sisi ekonomi, partisipasi politik, pendidikan dan kesehatan, bahkan keterbatasan akses untuk mobilisasi dan berekspresi di ruang publik. Terbatasnya peran perempuan di arena publik menjadikan perempuan di Arab Saudi tidak dapat dengan bebas menentukan nasib dan pilihannya. Karena kurangnya akomodasi dan tidak didukungnya hak dan kepentingan perempuan untuk tampil di muka umum.

Hal ini didukung berdasarkan hasil penelitian United Nations pada tahun 2017 dengan buku yang berjudul "*Women's Political Representation in the Arab Region*". Dalam buku tersebut peneliti menyoroti rendahnya persentase keterwakilan perempuan di kabinet pemerintahan seperti di dewan penasehat, dialog nasional atau komite konstitusional yang masih di dominasi oleh laki-laki. Keberadaan perempuan kurang terwakili di eksekutif, termasuk sebagian besar negara-negara di Timur Tengah terutama Arab Saudi hanya menunjuk satu atau dua perempuan untuk jabatan tingkat kabinet dan perempuan juga tetap kurang terwakili di lokal dewan. Dalam penelitian penulis mengungkapkan masih sangat sedikit perempuan yang duduk di konstitusional tertinggi, atau banding.

Penulis menilai gambaran regional ini merupakan hasil dari beberapa hambatan sosiokultural dan struktural untuk representasi politik perempuan. Hambatan sosial budaya berasal dari keyakinan dan norma patriarki yang selama ini melekat dan mengakibatkan peran spesifik gender. Sebagian besar perempuan di kawasan Timur Tengah memiliki keterbatasan untuk menyeimbangkan kehidupan profesional dibandingkan dengan rekan laki-laki. Dunia politik dinilai

sebagai arena laki-laki yang sangat luas dan dianggap sebagai permainan kotor menjadikan nya tempat yang tidak aman bagi perempuan, sehingga hal ini yang menjadi asumsi untuk mencegah perempuan terlibat di dalam kehidupan politik.

Penulis berargumen bahwa keterlibatan perempuan Saudi dapat menciptakan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan dan pembangunan negara Arab Saudi terutama di bidang ekonomi dan politik dapat mempercepat proses pembangunan secara signifikan. Terlebih jika dukungan pendidikan yang lebih besar bagi perempuan untuk mengambil pekerjaan di bidang TI dan komunikasi dapat meningkatkan pengembalian investasi pemerintah dalam sistem pendidikan negara.

Argumen tersebut berkaitan dengan penelitian tahun 2014 yang ditulis oleh Safaa Fouad Rajkhan dengan judul “*Women in Saudi Arabia Status, Rights, and Limitations*“. Dalam penelitian ini penulis berasumsi bahwa keterlibatan perempuan sudi di ruang publik dapat membawa perubahan yang akan mengembangkan masyarakat Saudi. Negara perlu berinvestasi dalam sumber daya manusia nya dengan mengembangkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan, jika ingin tampil sebagai negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan. Peneliti memberikan saran kepada pemerintah Saudi untuk dapat mengembangkan rencana aksi nasional dan perumusan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Kebijakan perlu menargetkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan tenaga kerja. Selain itu peneliti menyampaikan pentingnya kampanye kesadaran publik yang berfokus dalam mengubah stereotip gender tradisional yang menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dengan baik dalam perekonomian. Hadirnya kampanye media, konferensi, dan iklan layanan masyarakat dapat digunakan secara efektif untuk menyampaikan pesan mendasar yang menyatakan perempuan Saudi harus memainkan peran penting dalam masyarakat. Perempuan juga harus didorong dan dipersiapkan untuk mengambil posisi yang sangat terlihat, dan harus dipilih untuk mewakili Kerajaan pada pertemuan regional dan internasional, terlebih jika perempuan tersebut sangat memenuhi syarat dan mampu memegang posisi yang dibutuhkan.

Terakhir peneliti juga menyebutkan bahwa Kementerian tenaga kerja memiliki andil untuk menciptakan, mempromosikan, dan menerapkan sistem

dukungan infrastruktur bagi perempuan pekerja. Kebijakan ramah keluarga termasuk jam kerja yang fleksibel, cuti orang tua, dan fasilitas penitipan anak sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak menghindari tenaga kerja karena khawatir akan kesejahteraan anak-anak. Kurangnya kebijakan tersebut adalah salah satu alasan utama mengapa wanita Saudi memutuskan untuk tidak bergabung dengan angkatan kerja. (Rajkhan S. F., 2014).

Meskipun begitu, berdasarkan laporan dari *Global Gender Gap Report* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum (WEF)* pada tahun 2016, Arab Saudi berada di urutan paling bawah yakni peringkat 141 dari 144 negara yang dianggap buruk dalam menepati hak dan kepentingan perempuan. Dengan skor 0,583 dalam paritas gender. (World Economic Forum, 2016).

Seperti rendahnya keterlibatan kepemimpinan perempuan di level pendidikan tinggi. Terlepas dari dominasi perspektif tentang kepemimpinan perempuan, yang secara konsisten menekankan rendahnya keterwakilan perempuan di hampir setiap bidang politik dan ekonomi kehidupan di negara-negara di seluruh dunia, sangat sedikit yang diketahui tentang kepemimpinan perempuan, terutama pendidikan tinggi di Kerajaan Arab Saudi (KSA). Melalui penelitian yang bersumber dari Azzah Alsubaie dan Jones Karen dalam judulnya "*An Overview of the Current State of Women's Leadership in Higher Education in Saudi Arabia and a Proposal for Future Research Directions*". Peneliti menyoroti keadaan kepemimpinan pendidikan tinggi wanita saat ini di Arab Saudi dan mengusulkan arah baru untuk penelitian masa depan dalam mengatasi kelangkaan pekerjaan empiris saat ini tentang kepemimpinan perempuan dalam pendidikan tinggi di Arab Saudi. Ini mungkin relevan untuk wilayah lain di Timur Tengah dan di tempat lain.

Arab Saudi merupakan negara yang tengah mengalami perubahan sosial (Alyami, 2016) . Namun aspek kunci perubahan seperti partisipasi perempuan dalam kesempatan pekerjaan terutama kepemimpinan perempuan, mendapat perhatian yang terbatas dari civitas akademika. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran tentang keadaan kepemimpinan perempuan saat ini dengan fokus pada konteks pendidikan tinggi, dan mendiskusikan proposal untuk arah penelitian masa depan. Sejarah telah menyaksikan perubahan besar dalam sikap

terhadap pendidikan bagi perempuan Saudi selama ini lima dekade terakhir yang telah mengakibatkan persentase wanita yang lulus dari pendidikan tinggi mencapai tingkat rekor (Abalkhail & Barbara, 2015).

Banyak wanita telah mengukir karir yang sukses di pendidikan tinggi dan sektor lainnya. Ini sangat menunjukkan bahwa banyak perempuan Arab Saudi ingin memiliki peluang karir yang sama seperti perempuan di belahan dunia lain. Jika kebijakan dan rencana pemerintah untuk kemajuan perempuan di tempat kerja menjadi cerminan keberhasilan yang dicapai dalam pendidikan, perempuan Arab Saudi mungkin menuai keuntungan di tahun-tahun mendatang. Ini harus dilihat sebagai pekerjaan yang sedang berjalan, di mana civitas akademika dapat berkontribusi melalui penelitian empiris dan karya ilmiah.

Terlepas dari keberatan yang kuat terhadap pendidikan untuk perempuan dan kekhawatiran bahwa itu tidak akan berguna dan bahkan berbahaya, pendidikan telah meningkat secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Ini khususnya terjadi sejak Raja Abdullah naik takhta pada 2005. Bahkan, saat ini sudah terdapat 36 perguruan tinggi di negara Arab Saudi. *E-learning* juga mendapatkan popularitas, terutama di kalangan perempuan yang tidak dapat mengakses pendidikan tinggi arus utama. Sesuai dengan konvensi budaya, laki-laki dan perempuan dipisahkan dalam pendidikan dan mata pelajaran lebih terbatas untuk perempuan. Ini karena secara sosial tidak dapat diterima bagi perempuan untuk mengejar karir tertentu dan mereka dilarang mempelajari beberapa mata pelajaran di Arab Saudi (Mobaraki & Söderfeldt, 2010) Untuk mengatasi keterbatasan ini, banyak keluarga mengirim anak perempuan mereka ke luar negeri untuk mempelajari spesialisasi yang tertutup bagi mereka (Hamdan, *Women and education in Saudi Arabia: Challenges and achievements*, 2005)

Namun, selama dekade terakhir beberapa pembatasan telah dicabut. Terbukti sejak tahun 2007 perempuan telah diizinkan untuk belajar hukum, dan pintu dibuka bagi perempuan pertama untuk mendapatkan gelar Master di bidang arkeologi pada tahun 2009. Selaras dengan filosofi segregasi gender, ada beberapa universitas untuk pria, seperti Universitas Perminyakan dan Mineral King Fahad dan Universitas Islam. Universitas untuk wanita termasuk Universitas Putri Nora binti Abdul Rahman, yang mempercayakan wanita pertama sebagai rektor,

menjadikan wanita setara dengan rekan pria di universitas Saudi lainnya untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa. Universitas ini juga dikelola sepenuhnya oleh wanita (Meijer, 2010).

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa universitas *co-ed* telah dibuat, meskipun pria dan wanita masih dipisahkan menjadi beberapa bagian (kampus), satu untuk pria dan satu untuk wanita, dan mereka belajar secara terpisah. Hanya ada satu universitas di mana pemisahan tidak terjadi, memungkinkan siswa laki-laki dan perempuan untuk belajar bersama, yaitu Universitas Sains dan Teknologi Raja Abdullah. Investasi besar-besaran dalam pendidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa ini adalah prioritas kebijakan utama bagi pemerintah. Misalnya, rencana pendidikan lima tahun yang diumumkan pada tahun 2014 diperkirakan bernilai 80 miliar riyal atau \$21,33 miliar untuk sektor pendidikan (Reuters, 2014). Banyak dari investasi ini diarahkan ke pendidikan tinggi. Pada tahun 2005, Program Sponsor Raja Abdullah (KASP) didirikan. Program ini menawarkan siswa Saudi berbagai peluang, termasuk belajar di luar negeri di negara-negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Dalam buku tahunan statistik Saudi untuk tahun 2012-2013, (Manail, 2015) melaporkan ada sekitar 150.109 laki-laki dan 49.176 perempuan (kira-kira rasio 3:1) belajar di luar negeri. Statistik terkini dari Pusat Statistik Kementerian Pendidikan tahun 2017 menunjukkan jumlah perempuan yang mengambil gelar PhD di negara barat adalah 5165. Angka ini setara dengan 41,91% siswa Saudi yang belajar untuk PhD di negara barat. Sekarang secara luas disepakati bahwa banyak wanita Saudi telah membuat kemajuan fenomenal dalam pendidikan, seperti yang terlihat dari peningkatan eksponensial dalam jumlah wanita yang mengakses pendidikan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana dan pascasarjana. (Alsubaie & Jones, 2017).

Penulis tidak dapat memungkiri bahwa munculnya fenomena Arab Spring tahun 2011 silam lambat laun membawa perubahan yang cukup signifikan terutama mengenai demokrasi dan isu sosial lainnya dimulai sejak tahun 2015 pada masa pemerintahan raja Salman di Arab Saudi.

Salman bin Abdulaziz al-Saud merupakan Raja dan Perdana Menteri Arab Saudi. Beliau berkuasa pada Januari 2015. Tugasnya sebagai Raja, memiliki

kewenangan untuk menandatangani atau menolak undang-undang, tetapi keputusannya sering didasarkan pada kesepakatan di dalam keluarga kerajaan dan anggota komunitas penting, termasuk; ulama, syekh suku, dan pemilik bisnis besar. Arab Saudi tidak memiliki partai politik, namun ada beberapa gerakan politik pemberontak yang dianggap sebagai pihak illegal karena perbedaan arah pendapat.

Pada 2015, perempuan Saudi diberi hak untuk memilih dan mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan kota. Pada akhirnya, Arab Saudi memilih wanita pertama untuk jabatan politik dalam sejarah Arab Saudi. Meskipun begitu, pendaftar voting masih dalam jumlah yang rendah, dengan 130.000 wanita mendaftar untuk memilih, dibandingkan dengan lebih dari 1,3 juta pria. Dalam pencalonan kandidat, 978 perempuan berhadapan dengan 5.938 laki-laki.

Pada Juni 2017, Raja mengumumkan bahwa putranya, Mohammad bin Salman, akan menjadi pewaris pertama takhta. Seperti biasa, sang pangeran sudah memegang sejumlah besar kekuasaan dan mengendalikan banyak tuas utama pemerintahan sebagai Putra Mahkota dan Wakil Perdana Menteri. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Saudi telah berusaha untuk memberantas korupsi dan mengejar reformasi ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan memperkuat investasi asing. Ini sangat penting karena negara berupaya mendiversifikasi pendapatannya di luar ekspor minyak, yang menghasilkan lebih dari 85% pendapatan pemerintah. Pada dasarnya, salah satu tujuan politik utama pemerintah Arab Saudi adalah mempertahankan aliansinya dengan Amerika Serikat. Pada awal 2019, pemerintah menunjuk Putri Reema binti Bandar sebagai duta besar wanita pertama untuk AS.

Pemerintah Saudi mengklaim telah memperbaiki kondisi bagi warga negara perempuan, yang terbaru dengan mengesahkan undang-undang yang mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Namun, masih ada jalan panjang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Saat ini, semua wanita di Arab Saudi harus memiliki wali laki-laki; biasanya suami mereka, yang menggantikan ayah mereka setelah mereka menikah. Secara teoritis, perempuan dapat belajar dan bekerja tanpa izin, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Pengenalan sistem yang lebih modern, seperti layanan pesan teks bagi perempuan untuk meminta

izin bepergian, telah membantu mempercepat proses tersebut. Meskipun demikian, kekhawatiran terus berlanjut tentang betapa mudahnya bagi pria untuk mengontrol dan mengawasi wanita.

Hadirnya angin segar bagi demokrasi di Arab Saudi menjadi salah satu tantangan dan juga tujuan global Arab Saudi yang dinyatakan dalam Visi 2030. Hal ini di dukung dengan literatur yang bersumber dari jurnal dengan judul "*Will Saudi Arabia Move toward Democracy as Socialism Falter?*" yang ditulis oleh Judith Cochran dan Hugh V. Murray. Dalam jurnalnya, penulis lebih menjabarkan pendapatnya mengenai tujuan Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak dan menjadikannya sebagai pusat ekonomi, industri, budaya dan agama global. Banyak lingkungan Arab Saudi saat ini mendukung visi ini dengan adanya Raja dan Putra Mahkota yang otoriter serta sumber daya minyak dan gas yang tidak diketahui yang mereka miliki.

Namun, ada beberapa tantangan eksternal dan internal urbanisasi, pariwisata, pendidikan dan ekonomi yang unik. Mulai dari ekonomi, 35.000 anggota keluarga kerajaan bersama dengan militer dan pegawai negeri mengharapkan tunjangan hidup dari pemerintah. Dengan pendapatan yang terjamin, hanya ada sedikit insentif bagi warga Saudi untuk mencari atau mempertahankan pekerjaan atau untuk mendapatkan gelar dalam bentuk apa pun. Ketika mencoba untuk melakukan perubahan dalam aspek pendidikan, para pemimpin setuju bahwa di masa lalu pendidikan Saudi belum mempersiapkan siswa dengan keterampilan sekuler, teknis atau pasar. Namun, Putra Mahkota telah bergerak maju dalam mewajibkan bisnis untuk mempekerjakan 70% karyawannya.

Tujuan lain dari Visi 2030 adalah menjadikan Arab Saudi sebagai pemimpin agama dan budaya Arab Saudi yang diakui dunia. Arab Saudi sedang dalam perjalanan untuk mencapai harapan ini dengan lebih dari 19 juta peziarah haji dan umrah tiba setiap tahun untuk mengunjungi masjid-masjid besar dan situs keagamaan penting lainnya yang terletak di negara itu. Bisnis dan industri pariwisata yang luas ada untuk melayani para pengunjung ini. Arab Saudi membuka area hiburan, tempat konser, dan membangun negara kota mandiri dengan teknologi baru untuk para peziarah, turis, dan semoga pengunjung lainnya.

Tantangan internal dan eksternal untuk Visi 2030 dapat didiskusikan. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini berada di pundak lebih dari 50% warga Saudi yang sekarang berusia di bawah 25 tahun dan akan menerima atau menolak pekerjaan yang terlibat dalam mencapai tujuan 2030.

Raja Salman dan Mahkota raja yang baru telah menerbitkan rencana baru yaitu Visi 2030 yang membayangkan perpindahan masyarakat dari sosialisme ke pasar tenaga kerja berbasis pasar tanpa gangguan sosial. Untungnya transisi ini akan terjadi di bawah pemerintahan otoriter yang sangat terpusat yang saat ini tidak perlu menghadapi demokrasi partisipatif, kecuali demokrasi yang sangat dibatasi di tingkat lokal.

Penulis berpendapat jalur modernisasi bertahap tampaknya yang paling mungkin untuk terus maju di Arab Saudi. Putra Mahkota dan ayahnya Mohammed bin Salman terus bergerak cepat untuk merangkul perubahan. Dengan pemikiran ini, perubahan kemungkinan akan berlanjut, tetapi mereka lebih cenderung berfokus pada bidang sosial dan menghindari struktur pemerintahan. Seiring dengan waktu, besarnya kemungkinan kelompok-kelompok lain yang berkepentingan akan menghasilkan kekuatan tandingan untuk menjaga agar perubahan progresif tetap datang. Ada tiga kelompok kekuatan kontra tersebut: Syiah, imigran Muslim, dan pendatang baru yang penting dengan keterampilan khusus yang akan dibawa Visi 2030 ke negara itu dalam beberapa dekade mendatang. Ini akan mewakili mungkin 50% dari orang yang hadir di negeri itu.

Penulis mengungkapkan masalah yang mungkin paling sulit diselesaikan dalam mewujudkan visi 2030, yakni Pergeseran dari pemerintahan otoriter (kerajaan) ke pemerintahan demokratis (khususnya demokrasi partisipatoris penuh) tidak hanya membutuhkan pendidikan sejarah dan kewarganegaraan rakyat, tetapi pada tingkat yang lebih mendasar, dan Perasaan dasar kesetaraan di antara semua orang (misalnya Sunni untuk Syi'ah, pria untuk wanita. Sistem pendidikan saat ini memperkuat loyalitas kepada Raja, Islam dan superioritas suku. Kesetaraan tidak dipupuk dalam sistem pemerintahan, agama, sosial atau pendidikan. (Cochran & Murray, 2020).

Penulis menilai bahwa kesadaran pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan pentingnya keterlibatan perempuan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang

baik merupakan suatu rencana untuk memajukan pembangunan dan perekonomian Arab Saudi kedepannya yang dapat menjadikan negara tersebut mulai melunak dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyuarakan hak nya dalam rangka menciptakan ruang demokrasi.

Hal tersebut juga dibuktikan pada pertengahan 2016, Pengacara asal Saudi, Nasreen Alissa turut meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan “*Know Your Rights*” untuk memberikan informasi kepada wanita tentang hak-hak hukum mereka. Perempuan di Arab Saudi bahkan menyerukan untuk tinjauan undang-undang yang melarang pencampuran gender di tempat umum. Terutama di area publik seperti; mall, taman, restoran, sekolah, dan kedai kopi khusus perempuan. Karena perempuan ingin merasa bebas untuk mengekspresikan kemandirian mereka secara terbuka tanpa pengawasan laki-laki.

Adanya ketimpangan gender dan budaya patriarki yang terjadi di Arab Saudi, membuat sekelompok perempuan di Arab Saudi membentuk suatu gerakan pada awal 2017, yakni sebuah kampanye yang dinamakan *Saudi Anti Male Guardianship Campaign*, dengan maksud agar pemerintah Arab Saudi menyudahi kebijakan yang membatasi perempuan untuk bermobilisasi dan membuat keputusan. Terutama kebijakan perihal sistem perwalian atau *male guardianship* yang dinilai mencegah perempuan untuk melakukan sesuatu tanpa izin terlebih dahulu kepada wali, kerabat pria dan muhrimnya. (Tonnessen, *Women’s Activism in Saudi Arabia: Male Guardianship and Sexual Violence*, 2016)

Saudi Anti Male Guardianship Campaign juga diserukan oleh para perempuan di Arab Saudi dengan mengedarkan petisi online di Twitter lewat tagar #IAmMyOwnGuardian dan mengadakan lokakarya untuk mendidik perempuan tentang undang-undang perwalian. Kampanye ini juga turut menyorot hak atas akses pendidikan yang terbatas bagi perempuan. (Alsahi, 2018)

Terutama sistem perwalian laki-laki di Arab Saudi yang membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan karena anak perempuan tidak dapat dididik tanpa persetujuan wali laki-lakinya. Wali laki-laki memiliki wewenang untuk mencegah anak perempuan melanjutkan studi mereka di semua tingkatan, termasuk studi sarjana dan pasca sarjana. Selain itu, diperlukan izin dari wali laki-laki dalam memilih bidang studi.

Dalam hal ini, adanya kampanye aktivisme *Saudi Anti Male Guardianship* dan tagar #IamMyOwnGuardian yang mulai diserukan oleh partisipasi perempuan Arab Saudi pada akhir tahun 2016, bermaksud ingin mendesak dan memastikan bahwa pemerintah Arab Saudi memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional untuk memberikan hak yang sama bagi pria dan wanita terutama memberikan akses pendidikan yang setara di semua tingkat akademik, sumber daya dan fasilitas yang sama. (Alsahi, 2018).

Dalam penelitian mengenai kebijakan reformis Arab Saudi, Penulis beranggapan bahwa munculnya kampanye yang diserukan melalui sosial media seperti Facebook, YouTube dan Twitter, untuk menyuarakan aspirasi terkait hak-hak perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam menyebarkan pesan para aktivis hak-hak perempuan ke seluruh dunia. (Rizal & Khoirina, 2019).

Pada kenyataannya ruang publik online akan menghasilkan perubahan jangka panjang yang berarti. Pada saat penulisan hasil penelitian ini, penulis menemukan telah terjadi perubahan di beberapa instansi pemerintah yang memungkinkan perempuan mengakses layanan tanpa izin dari wali laki-laki.

Meskipun begitu, Penulis berpendapat hal tersebut merupakan langkah yang dinilai lebih signifikan daripada yang terlihat karena konteks Saudi sangat berbeda dari negara-negara Arab lainnya (di mana perempuan memainkan peran penting dalam pemberontakan Arab). Di negara-negara Arab lainnya, perempuan lebih banyak dan lebih mungkin untuk dihormati oleh laki-laki sebagai bagian integral dari gerakan sosial yang muncul di sana, beberapa di antaranya juga berfokus pada peningkatan hak-hak perempuan. Peneliti tetap mengidentifikasi ruang online dan sosial media dapat menjadi *public sphere* yang memfasilitasi ekspresi publik terutama perempuan untuk membahas tentang isu-isu di mana mereka sebelumnya telah dibungkam dan terpinggirkan. Seperti pada awalnya, Arab Saudi yang sangat gencar dalam menciptakan kebijakan *male guardianship* atau sistem perwalian kepada perempuan, sehingga hampir semua aspek yang dilakukan perempuan harus mendapat izin dari suami, ayah, atau saudara laki-lakinya. Aturan mengikat yang diterapkan Arab Saudi diantaranya; perempuan dilarang berolahraga, belajar, mengemudi atau bahkan bekerja. Ruang

publik di Arab Saudi dinilai belum dapat menghargai hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Namun sejak visi 2030 yang ingin mengubah kesan konservatif dicetuskan, banyak perubahan yang terjadi. Segala macam pembatasan eksternal membuat Arab Saudi menghapus sistem perwalian, mempertimbangkan partisipasi perempuan dalam politik, dan mengeluarkan dekrit untuk mencabut larangan mengemudi bagi 20 perempuan. Perempuan di Arab Saudi kini bebas menikmati hidup, pergi ke sekolah, menonton pertandingan, dan berpakaian dengan bebas. Selain itu perempuan bebas mengenyam pendidikan setinggi mungkin tanpa harus mendapat izin wali. Karena perubahan kebebasan perempuan di Arab Saudi disertai dengan berlakunya undang-undang, sehingga perempuan di Arab Saudi akan merasa bahwa mereka memiliki kebebasan untuk melakukan banyak hal ketika dihapusnya sistem perwalian laki-laki atau *male guardianship* (Umsila, 2016).

Maraknya aktivis perempuan yang menyuarakan mengenai kesempatan dan hak perempuan untuk terlibat dalam ruang publik, turut menyorot ranah pendidikan yang dinilai masih kurang memberikan kesempatan akses dan fasilitas pendidikan yang sama diantara perempuan dan laki-laki. Perempuan Saudi ingin pemerintah Arab Saudi mencabut semua persyaratan yang menghalangi siswa perempuan untuk melanjutkan pendidikan mereka di semua tahap termasuk persyaratan bahwa wali laki-laki menemani setiap perempuan Saudi yang belajar di luar negeri dengan beasiswa pemerintah.

Berbicara mengenai pendidikan, penulis berpendapat bahwa pemerintah Arab Saudi harus memperbarui sistem pendidikan untuk membuat program pelatihan guru secara universal karena praktik dan kepribadian guru yang sangat memengaruhi keberhasilan dan kualitas pendidikan di dalam kelas. Guru harus menetapkan kurikulum yang sesuai dengan populasi siswa yang beragam di mana budaya, bahasa, agama, status sosial ekonomi atau. Guru tidak boleh bertindak sebagai entitas yang tahu segalanya tetapi harus bangga menjadi pembelajar yang menyerap ide-ide baru dari siswa dan rekan-rekannya. Guru yang efektif menerima bahwa selalu ada ruang untuk pertumbuhan dan menganut mindset

berkembang. “Keyakinan mempengaruhi perilaku”, seperti yang dicatat oleh John Dewey pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul *How We think*.

Dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Nouf Alsuwaida dengan judul “*Women’s Education in Saudi Arabia*”, Penelitian ini menyoroti informasi penting tentang sejarah, politik, ideologi (nilai), dan kebijakan pemerintah seputar pendidikan perempuan di Arab Saudi dan menawarkan implikasi bagi pemberdayaan perempuan melalui pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan tinggi telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tradisi budaya Saudi dan norma-norma agama. Pemerintah Saudi harus menerapkan sistem pendidikan yang mendukung perempuan dan menyeimbangkan sosial konstruksi gender. Sistem baru ini perlu mendesain ulang pelatihan mengajar untuk merangkul mindset berkembang. Hal ini penting untuk memberi perempuan kesempatan untuk sukses di masa depan dan menjalani kehidupan yang mandiri. Perubahan sosial dinilai hal yang terlambat hadir di Arab Saudi. Sehingga guru dan pemimpin politik harus sangat kreatif dalam perkembangan yang begitu pesat di mana perspektif dan pendapat mereka yang bertepatan terus berubah. Semua orang Arab Saudi bertanggung jawab untuk masa depan gerakan pendidikan perempuan.

Paulo Freire (2005) dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed* berkata bahwa "selalu ada hubungan antara ketakutan dan kesulitan" (hal. 49). Dia dengan tepat menunjukkan bahwa perempuan takut untuk menyimpang dari norma di Arab Saudi, mereka takut akan perubahan. Peneliti sangat ingin mendorong perempuan untuk dididik dan saling mendukung satu sama lain dan tentunya di bidang pendidikan ini peneliti sangat menyarankan pemerintah Arab Saudi untuk mulai memasukan kurikulum pendidikan yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan zaman. (Alsuwaida, 2016).

Selain itu, Penulis berpendapat mengenai pendidikan multikultural di Arab Saudi yang relevan dengan visi 2030. Seperti hasil penelitian Reem Aldegether dalam jurnal yang berjudul “*Saudi Arabia’s Vision 2030: Approaches to Multicultural Education and Training*”, peneliti berpendapat meskipun pendidikan multikultural merupakan reformasi khas gerakan Amerika serikat, tetapi hal ini juga relevan dengan isu-isu sosial dan pendidikan di negara lain.

Karena proses moderasi yang terjadi di Arab Saudi sejak peluncuran Saudi Vision 2030 (Visi 2030) pada 2017, menjadikan adanya keterbukaan terhadap budaya yang berbeda dan mendorong siswa di Arab Saudi untuk mengembangkan keterlibatan global, berpikiran terbuka, dan menjadi siswa yang kompeten. Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas mengenai penerapan teori pendidikan multikultural ke pendidikan Arab Saudi, dengan alasan bahwa berbagai pendekatan kontemporer untuk pendidikan multikultural dapat digunakan untuk menyusun kurikulum multikultural yang mengambil situasi unik yang diperhitungkan. Tulisan ini juga membahas masing-masing pendekatan dan pertimbangan sosial, dan berharap dapat menasihati para pendidik Saudi tentang memasukkan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum mereka.

Peneliti berpendapat bahwa pendekatan multikultural akan sangat berbeda ketika di implikasikan di kerajaan Arab Saudi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Arab Saudi dianggap sebagai rumah bagi semua Muslim di seluruh dunia. Mengingat hal tersebut, Masyarakat Saudi dapat menerima pluralisme dan multikulturalisme yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka untuk mendorong apresiasi dan perbedaan. Fakta ini membuat penerapan pendekatan multikultural untuk pendidikan mungkin terjadi. Namun, tidak semua kerangka kerja yang dipromosikan oleh beberapa pendekatan untuk pendidikan multikultural berlaku untuk kurikulum Saudi.

Para penulis menemukan bahwa Pendidikan Multikultural yang dipromosikan oleh (Grant & Sleeter, 2006) adalah yang paling tepat untuk konteks Saudi. Namun, terbukti bahwa mengadopsi pendekatan seperti itu akan membutuhkan perubahan mendasar pada kelembagaan dan ideologis Arab Saudi. Meskipun begitu implementasi multikultural pendidikan sangat penting. Untuk tujuan ini, penting untuk mendirikan organisasi yang membimbing sekolah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum multikultural sebagai bagian dari pendidikan nasional standar yang dibutuhkan pada tingkat pendidikan yang berbeda. Dengan demikian, penulis lebih lanjut menyarankan perlunya menyelidiki masalah yang berkaitan dengan persepsi, kesadaran, evaluasi kurikulum, dan strategi pengajaran serta potensi hambatan yang dapat

menghambat penerapan pendidikan multikultural di Arab Saudi. (Aldegether, 2020).

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan, penelitian ini cukup menarik untuk dibahas oleh penulis karena berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, kemunculan fenomena *Arab Spring* ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan dan tatanan sosial budaya di Timur Tengah. Terutama bagi pergantian rezim dan masa pemerintahan Raja Arab Saudi, yakni Raja Salman. Keterbatasan perempuan di ruang publik mejadi momok besar yang harus dapat di atasi oleh pemerintah Arab Saudi. Aktivisme yang diserukan kepermukaan, menandai keberanian perempuan untuk melakukan perubahan demi kesetaraan gender dan merebut kembali hak dan kepentingan perempuan yang selama ini dibungkam oleh budaya konservatif di negara Arab Saudi.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Pengaruh Fenomena *Arab Spring* Terhadap Kebijakan Ketersediaan Akses Pendidikan Perempuan di Arab Saudi Pada Periode Pemerintahan Raja Salman Tahun 2016-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang peranan Rezim pemerintahan Raja Abdul Salman mengenai kebijakannya dalam era *post - Arab Spring* tahun 2011 silam. Terutama kebijakan reformis yang berkaitan dengan hak – hak perempuan di Arab Saudi.
2. Penelitian ini juga membahas peranan modernisasi di Arab Saudi yang mendorong hadirnya *women empowerment* dan *digital activism* di era globalisasi yang dapat ikut menyurakan dan melindungi hak perempuan di dunia. Sehingga pembaca dapat memaknai pentingnya peran perempuan dalam memberikan kontribusi yang dapat menumbuhkan perekonomian dan pembangunan negara di Arab Saudi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan secara umum mengenai pengaruh fenomena *Arab Spring* dan pemerintahan Raja Abdul Salman dalam membentuk suatu kebijakan di Arab Saudi yang lebih memberikan kelonggaran bagi perempuan untuk dapat tampil di ruang publik dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam memperoleh pendidikan dan menyuarkan hak dan pendapatnya baik di masyarakat secara nyata maupun kampanye melalui sosial media.

Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi dan data bagi para peneliti dan akademisi di bidang Hubungan Internasional mengenai pengaruh rezim pada masa pemerintahan Raja Salman pasca *Arab Spring* yang turut membentuk hadirnya gerakan *women empowerment* dalam mendukung reformasi kebijakan suatu negara terkait hak – hak perempuan di Arab Saudi dengan memberikan kebebasan untuk dapat berkontribusi secara umum bagi keberlangsungan pertumbuhan dan pembangunan negara Arab Saudi. Selain itu peneliti berhadapan hasil penelitian ini dapat ditujukan untuk peneliti selanjutnya.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam menjelaskan penelitian secara menyeluruh, maka penulis menyusun laporan skripsi ini kedalam beberapa bab yang menurut sistematika penulisannya terbagi menjadi 4 bab dengan beberapa Sub-bab yang saling berhubungan satu sama lain agar dapat menjadikan hasil penelitian lebih kompeherensif. Adapun pembagian sub-bab tersebut antara lain;

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian yang memuat latar belakang permasalahan yang diteliti oleh penulis, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian mengenai konsep dan teori pemikiran yang mencakup *literature review* dari beberapa sumber kredibel hasil pemikiran peneliti sebelumnya (berkaitan dengan topik skripsi yang akan penulis bahas), kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan asumsi dasar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian yang mencakup metode penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian terhadap topik yang akan dibahas. Metode penelitian didalamnya mencakup objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data dan tabel rencana waktu.

BAB IV & V : HASIL PENELITIAN

Bagian ini berisi bahasan penelitian mengenai Perubahan Sosial dan Pengaruh Arab Spring terhadap arah kebijakan pendidikan perempuan di Arab Saudi pada masa pemerintahan Raja Abdul Salman dan Modernisasi sebagai jembatan hadirnya Gerakan Saudi Women Digital Activism dan Inisiasi VISI 2030 Arab Saudi sebagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan akses pendidikan perempuan (2016-2020).

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan dari bahasan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan juga berisi saran untuk menjadi masukan terhadap permasalahan berkaitan dengan isu yang diangkat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA